



PENGUMUMAN

Nomor : 175/PPT/PN.01

Tentang

**Seleksi Calon Penyedia Jasa Konsultasi
Bidang Perencanaan Pembangunan Tahunan
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun Anggaran 2026**

Dalam rangka pelaksanaan Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan ini memberikan kesempatan kepada Warga Negara Indonesia (WNI) untuk mengikuti Seleksi Calon Penyedia Jasa Konsultasi Bidang Perencanaan Pembangunan Tahunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta, dengan formasi:

- a. **Tenaga Ahli Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah sebanyak 1 (satu) orang;**
- b. **Tenaga Ahli Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta sebanyak 3 (tiga) orang;**
- c. **Tenaga Ahli Evaluasi Perencanaan dan Hasil Pengukuran Kinerja sebanyak 2 (dua) orang.**

I. PERSYARATAN KUALIFIKASI ADMINISTRASI/LEGALITAS MELIPUTI:

- a. Surat Lamaran yang ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bidang Perencanaan Pembangunan Tahunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta;
- b. Surat Pernyataan Pakta Integritas;

- c. Formulir Isian Kualifikasi;
- d. *Scan* Identitas Kewarganegaraan Indonesia seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Paspor/Surat Keterangan Domisili Tinggal;
- e. *Scan* Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- f. Surat pernyataan yang ditandatangani Peserta yang berisi:
 - 1. Tidak dikenakan Sanksi Daftar Hitam;
 - 2. Keikutsertaannya tidak menimbulkan pertentangan kepentingan pihak yang terkait;
 - 3. Tidak dalam pengawasan pengadilan dan/atau sedang menjalani sanksi pidana;
 - 4. Tidak berstatus Aparatur Sipil Negara, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti di luar tanggungan negara;
 - 5. Tidak sedang terikat kontrak kerja dengan Instansi lain;
 - 6. Bersedia ditempatkan di wilayah Provinsi DKI Jakarta;
 - 7. Tidak menuntut apabila anggaran tidak tersedia dan terdapat perubahan anggaran dalam DPA-Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2026 atau proses pengadaan langsung dibatalkan;
 - 8. Tidak menuntut untuk diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan/atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK); dan
 - 9. Menjaga seluruh data dan informasi yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan tidak boleh dipergunakan untuk keperluan apapun tanpa persetujuan tertulis Bappeda Provinsi DKI Jakarta.
- g. *Scan* Ijazah yang sesuai dengan syarat kualifikasi;
- h. Foto berwarna ukuran 4x6;
- i. Daftar Riwayat Hidup/Curriculum Vitae (CV); dan
- j. Bersedia untuk mempunyai akun Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKaP LKPP) pada LPSE DKI Jakarta apabila dinyatakan lulus Seleksi Calon Penyedia Jasa Konsultasi Bidang Perencanaan Pembangunan Bappeda Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2026.

II. PERSYARATAN KUALIFIKASI TEKNIS MELIPUTI:

a. Tenaga Ahli Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah

1. Tenaga Ahli Asisten Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, dengan spesifikasi:

- a) Memiliki latar belakang pendidikan S1 Statistik / S1 Ilmu Ekonomi Pembangunan yang memadai;
- b) Mampu melakukan analisis data dan menyajikannya dalam bentuk paparan dengan baik;
- c) Dapat mengoperasikan Microsoft Excel dengan baik;
- d) Memiliki inisiatif yang tinggi;
- e) Cekatan, berorientasi pada hasil, dan bertanggungjawab terhadap tugas yang diberikan;
- f) Mampu berkomunikasi dan bekerja dalam tim dengan baik;
- g) Memiliki manajemen waktu yang baik;
- h) Berdedikasi dan bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan; dan
- i) Sanggup mematuhi peraturan yang berlaku dan menjaga rahasia pekerjaan sesuai dengan kerahasiaan urusan pemerintah.

b. Tenaga Ahli Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta

1. Tenaga Ahli *Assistant Supervisor* Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Pengalaman Minimal 5 (lima) Tahun, dengan spesifikasi:

- a) Memiliki latar belakang pendidikan S1 Perencanaan Wilayah dan Kota / S1 Ilmu Ekonomi Pembangunan / S1 Ilmu Administrasi Negara yang memadai dengan pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun;
- b) Memiliki pengalaman bekerja di Instansi Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, dan Lembaga Negara atau setara;
- c) Diutamakan memiliki pemahaman dan kemampuan analisa makroekonomi, infografis, dan/atau rencana pembangunan;
- d) Diutamakan memiliki pengalaman dalam penyusunan kebijakan publik, *policy brief*, dan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan;

- e) Dapat mengoperasikan Microsoft Office dengan sangat baik dan penguasaan program lainnya guna mendukung pekerjaan menjadi nilai tambah;
- f) Berperilaku baik, *open minded*, dan *positive thinking*;
- g) Mampu berkomunikasi dengan baik;
- h) Mampu bekerja bersama (*team work*);
- i) Memiliki manajemen waktu yang baik;
- j) Disiplin, cekatan, dan berorientasi pada hasil; dan
- k) Berdedikasi dan bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan.

2. Tenaga Ahli Analis Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Pengalaman Minimal 3 (tiga) Tahun, dengan spesifikasi:

- a) Memiliki latar belakang pendidikan S1 Perencanaan Wilayah dan Kota / S1 Ilmu Ekonomi Pembangunan / S1 Ilmu Administrasi Negara yang memadai dengan pengalaman kerja minimal 3 (tiga) tahun;
- b) Memiliki pengalaman bekerja di Instansi Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, dan Lembaga Negara atau setara;
- c) Diutamakan memiliki pemahaman dan kemampuan analisa makroekonomi, infografis, dan/atau rencana pembangunan;
- d) Diutamakan memiliki pengalaman dalam penyusunan kebijakan publik, *policy brief*, dan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan;
- e) Dapat mengoperasikan Microsoft Office dengan sangat baik dan penguasaan program lainnya guna mendukung pekerjaan menjadi nilai tambah;
- f) Berperilaku baik, *open minded*, dan *positive thinking*;
- g) Mampu berkomunikasi dengan baik;
- h) Mampu bekerja bersama (*team work*);
- i) Memiliki manajemen waktu yang baik;
- j) Disiplin, cekatan, dan berorientasi pada hasil; dan
- k) Berdedikasi dan bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan.

3. Tenaga Ahli Analis Aspirasi Masyarakat Pengalaman Minimal 3 (tiga) Tahun, dengan spesifikasi:

- a) Memiliki latar belakang pendidikan S1 Perencanaan Wilayah dan Kota / S1 Ilmu Ekonomi Pembangunan / S1 Ilmu Administrasi Negara yang memadai dengan pengalaman kerja minimal 3 (tiga) tahun;
- b) Memiliki pengalaman bekerja di Instansi Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, dan Lembaga Negara atau setara;
- c) Diutamakan memiliki pemahaman dan kemampuan analisa makroekonomi, infografis, dan/atau rencana pembangunan;
- d) Diutamakan memiliki pengalaman dalam penyusunan kebijakan publik, *policy brief*, dan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan;
- e) Dapat mengoperasikan Microsoft Office dengan sangat baik dan penguasaan program lainnya guna mendukung pekerjaan menjadi nilai tambah;
- f) Berperilaku baik, *open minded*, dan *positive thinking*;
- g) Mampu berkomunikasi dengan baik;
- h) Mampu bekerja bersama (*team work*);
- i) Memiliki manajemen waktu yang baik;
- j) Disiplin, cekatan, dan berorientasi pada hasil; dan
- k) Berdedikasi dan bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan.

c. Tenaga Ahli Evaluasi Perencanaan dan Hasil Pengukuran Kinerja

1. Tenaga Ahli Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Pengalaman Minimal 3 (tiga) Tahun, dengan spesifikasi:

- a) Memiliki latar belakang pendidikan S1 Ilmu Ekonomi Pembangunan / S1 Perencanaan Wilayah dan Kota / S1 Administrasi Negara yang memadai dengan pengalaman kerja minimal 3 (tiga) tahun;
- b) Memiliki pengalaman dalam melakukan evaluasi kebijakan dan hasil kinerja pemerintahan, khususnya di pemerintah daerah;
- c) Diutamakan memiliki pengalaman bekerja di Instansi Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, dan Lembaga Negara atau setara;
- d) Mampu melakukan analisis terhadap perencanaan dan hasil pengukuran kinerja, termasuk kemampuan mengolah data dan menyusun laporan hasil evaluasi secara sistematis;
- e) Mampu menyusun kerangka logis (*logical framework*) untuk perencanaan pembangunan daerah;

- f) Terampil mengoperasikan Microsoft Office dan program pengolahan data lainnya yang relevan;
 - g) Mampu berkomunikasi dengan baik, serta mampu bekerja secara mandiri untuk memberikan kontribusi dalam tim; dan
 - h) Memiliki manajemen waktu yang baik, disiplin, cekatan, berorientasi pada hasil, serta bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan.
2. Tenaga Ahli Evaluasi Perjanjian Kinerja (Perkin), dengan spesifikasi:
- a) Memiliki latar belakang pendidikan S1 Ilmu Ekonomi Pembangunan / S1 Perencanaan Wilayah dan Kota / S1 Administrasi Publik / S1 Administrasi Negara atau setara yang memadai dengan pengalaman kerja minimal 3 (tiga) tahun;
 - b) Memiliki pengalaman dalam melakukan evaluasi kebijakan dan hasil kinerja pemerintahan, khususnya di pemerintah daerah;
 - c) Diutamakan memiliki pengalaman bekerja di Instansi Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, dan Lembaga Negara atau setara;
 - d) Mampu melakukan analisis terhadap perencanaan dan hasil pengukuran kinerja, termasuk kemampuan mengolah data dan menyusun laporan hasil evaluasi secara sistematis.
 - e) Terampil mengoperasikan Microsoft Office dan program pengolahan data lainnya yang relevan;
 - f) Mampu berkomunikasi dengan baik, serta mampu bekerja secara mandiri untuk memberikan kontribusi dalam tim; dan
 - g) Memiliki manajemen waktu yang baik, disiplin, cekatan, berorientasi pada hasil, serta bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan.

III. TATA CARA PENDAFTARAN

Pendaftaran dapat dilakukan dengan mengirimkan data lamaran sesuai dengan Persyaratan Administrasi dan Persyaratan Kualifikasi Teknis pada tanggal 2 - 10 Desember 2025 melalui tautan https://bit.ly/SELEKSITABIDANGP2T_2026

IV. JADWAL SELEKSI

Seluruh tahapan seleksi akan dilakukan di Jakarta, penjadwalan untuk seluruh tahapan seleksi adalah sebagai berikut:

No.	Tahapan	Waktu Pelaksanaan Seleksi
1.	Pengumuman Seleksi	1 Desember 2025
2.	Pendaftaran	2 - 10 Desember 2025
3.	Seleksi Administrasi	11 - 15 Desember 2025
4.	Pengumuman Seleksi Administrasi	15 Desember 2025
5.	Seleksi Wawancara	16 - 18 Desember 2025
6.	Pengumuman Seleksi Wawancara	19 Desember 2025

V. LAIN-LAIN

1. Pelamar yang dinyatakan lulus setiap tahapan seleksi, maka akan diajukan sebagai Calon Penyedia Jasa Konsultasi ke Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Bappeda Provinsi DKI Jakarta;
2. Bagi Pelamar yang tidak hadir dan/atau tidak mampu mengikuti tahapan seleksi dengan alasan apapun pada waktu dan tempat yang ditetapkan, maka dinyatakan gugur;
3. Apabila dalam pelaksanaan tahapan seleksi atau dikemudian hari setelah adanya pengumuman kelulusan akhir diketahui terdapat keterangan Pelamar yang tidak sesuai/tidak benar, maka Pejabat Pembuat Komitmen dapat menggugurkan kelulusan yang bersangkutan;
4. Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen tidak dapat diganggu gugat.

Jakarta, 1 Desember 2025
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Bidang Perencanaan Pembangunan Tahunan
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi DKI Jakarta

Eky Darmayanti
NIP 197001281998032004

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

No. Identitas :

Alamat :

Pekerjaan :

Bertindak untuk dan atas nama diri sendiri dalam rangka pengadaan Penyedia Jasa Lainnya Perorangan Belanja Jasa Tenaga Ahli pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta dengan ini menyatakan bahwa:

1. Tidak akan melakukan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
2. Akan melaporkan kepada PA/KPAJAPIP jika mengetahui terjadinya praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dalam proses pengadaan ini;
3. Akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
4. Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam angka 1, 2, dan 3 maka bersedia dikenakan sanksi administratif, dikenakan sanksi daftar hitam, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Jakarta,

Nama

FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

No. Identitas :

Alamat :

Telepon/Fax :

Email :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Saya secara hukum mempunyai kapasitas untuk menandatangani Kontrak;
2. Saya bukan sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah;
3. Saya tidak sedang menjalani sanksi pidana;
4. Saya tidak sedang dan tidak akan terlibat pertentangan kepentingan dengan pihak lain yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan ini;
5. Saya tidak sedang dikenakan sanksi Daftar Hitam, tidak dalam pengawasan pengaduan, tidak pailit atau kegiatan usahanya sedang dihentikan;
6. Data-Data yang saya sampaikan adalah sebagai berikut:

A. Data Administrasi

1 Nama :

2 Pekerjaan :

3 Alamat Rumah :

No. Telepon :

4 Alamat Kantor :

No. Telepon :

5 Email :

6 Nomor Identitas :

B. Data Pekerjaan yang Sedang Dilaksanakan
(contoh)

No	Nama Paket Pekerjaan	Ringkasan Lingkup Pekerjaan	Lokasi	Pemberi Pekerjaan		Status Penyedia dalam Pelaksanaan Pekerjaan	Kontrak		Progres Terakhir	
				Nama	Alamat; Telepon		Nomor; Tanggal	Nilai	Kontrak (Rencana)	Prestasi Kerja (%)
1	Tenaga Ahli Data Entry Pengelolaan Kearsipan	Mengelola Arsip Dinamis Bappeda Provinsi DKI Jakarta yang terdiri dari arsip aktif, arsip inaktif, dan arsip vital secara efisien, efektif, dan sistematis. Adapun ruang lingkup pengelolaan arsip dinamis Bappeda yang akan dikerjakan meliputi pemeliharaan serta penyusutan arsip.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta	Jalan Medan Merdeka Selatan No 8-9, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10110; 021-3822261	Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta	12/-077.922; 04 Januari 2021	Rp. 69.720.000,-	12/-077.922	80%

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Jika dikemudian hari ditemui bahwa data/dokumen yang saya sampaikan tidak benar dan ada pemalsuan, maka saya bersedia dikenakan sanksi administratif, dikenakan sanksi Daftar Hitam, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Jakarta,



Nama

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

NIK :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya:

1. Tidak dikenakan Sanksi Daftar Hitam;
2. Keikutsertaannya tidak menimbulkan pertentangan kepentingan pihak yang terkait;
3. Tidak dalam pengawasan pengadilan dan/atau sedang menjalani sanksi pidana;
4. Tidak berstatus Aparatur Sipil Negara, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti di luar tanggungan negara;
5. Tidak sedang terikat kontrak kerja dengan Instansi lain;
6. Bersedia ditempatkan di wilayah Provinsi DKI Jakarta;
7. Tidak menuntut apabila anggaran tidak tersedia dan terdapat perubahan anggaran dalam DPA-Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2026 atau proses pengadaan langsung dibatalkan;
8. Tidak menuntut untuk diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan/atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK); dan
9. Menjaga seluruh data dan informasi yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan tidak boleh dipergunakan untuk keperluan apapun tanpa persetujuan tertulis Bappeda Provinsi DKI Jakarta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Jika dikemudian hari ditemui bahwa data/dokumen yang saya sampaikan tidak benar dan ada pemalsuan, maka saya bersedia dikenakan sanksi administratif, dikenakan sanksi Daftar Hitam, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Jakarta,



Nama